

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM DALAM AKSI TAWURAN DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR LUBUK BEGALUNG

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:



WARDATUN NISAK
2110113151

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing ;

Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H
Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg: 25/PK-IV/IV/2025

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM DALAM AKSI TAWURAN DI WILAYAH
KEPOLISIAN SEKTOR LUBUK BEGALUNG**

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951. Berdasarkan penelitian di Polsek Lubuk Begalung menunjukkan banyak anak yang terlibat tawuran dengan senjata tajam, sehingga diperlukan penanggulangan yang efektif. Rumusan masalah penelitian mencakup: bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam tawuran, apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam tawuran, dan bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam tawuran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam tawuran dilakukan sesuai dengan aturan. Anak yang terlibat dapat dikembalikan kepada orang tua setelah dinasehati, sedangkan anak yang menyebabkan kerugian akan diproses secara hukum. Hambatan yang dihadapi oleh kepolisian meliputi kurangnya pengawasan orang tua, pergaulan anak yang bebas, kurangnya personel kepolisian, fasilitas CCTV yang kurang memadai, masyarakat yang takut melapor atau memberikan kesaksian. Untuk mengatasi hambatan ini kepolisian melakukan sosialisasi, memberi peringatan dini kepada anak-anak, dan melakukan patroli keliling pada waktu-waktu rawan. Kesimpulan adalah penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam di Polsek Lubuk Begalung dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Hambatan yang dihadapi kepolisian meliputi kurangnya pengawan orang tua, pergaulan bebas anak, kekurangan personel, fasislitas CCTV yang kurang memadai. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kepolisian melakukan sosialisasi kepada anak-anak, orang tua, dan masyarakat, memberikan peringatan dini serta melakukan patroli pada waktu-waktu rawan tawuran. Adapun saran yang diberikan adalah 1) perlunya perhatian khusus terhadap tawuran dengan senjata tajam. 2) Meningkatkan kesadaran hukum anak akan bahayanya tawuran dan sanksi hukum. 3) Memberikan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat. 4) Polsek Lubuk Begalung melakukan razia barang bawaan kepada anak yang berkumpul. 6) Pemerintah Daerah Sumatera Barat diharapkan membuat Perda khusus tentang tawuran dengan senjata tajam.

Kata Kunci: Senjata Tajam, Anak Pelaku Tawuran, Kepolisian